

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak di banyak negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Keadaan ini menggambarkan kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, layanan kesehatan, dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah adalah tingkat kemiskinan itu sendiri (Oktaviana et al., 2021). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan mencakup upah minimum yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, standar hidup yang rendah sehingga sulit untuk memperbaiki kondisi ekonomi, dan meningkatnya tingkat pengangguran setiap tahun tanpa disertai peningkatan dalam kesempatan kerja yang tersedia (Larasati Prayoga et al., 2021). Pangiuk (2018) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk mengatasi tantangan kemiskinan. Masalah keterbatasan lapangan kerja menjadi pemicu utama tingginya angka pengangguran, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan dalam masyarakat (O'Campo et al., 2015). Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kebutuhan fisik, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental individu. Orang-orang yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu sering menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai tingkat kebahagiaan yang memadai dan memiliki risiko lebih tinggi terkena gangguan mental yang serius. Studi menunjukkan bahwa kondisi ini

dapat menyebabkan masalah seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan kepribadian (Dohrenwend, 1971; Warheit, Holzer & Schwab, 1973, seperti yang dikutip dalam Farley, 1987).

Besarnya angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan masih banyaknya persoalan terkait kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi di mana seseorang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar (Fahrudin, 2014). Definisi ini sejalan dengan pandangan W.J.S Poewodarminto seperti yang dikutip oleh Adi (2015), yang mengartikan kesejahteraan sebagai keadaan aman, makmur, dan terlindungi dari berbagai gangguan atau kesulitan.

Kesejahteraan sosial pada dasarnya bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh. Ini meliputi tersedianya kebutuhan primer yang mencakup pakaian yang layak, makanan yang cukup, dan tempat tinggal yang memadai. Selain itu, kesejahteraan sosial juga berfokus pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. (Fahrudin, 2014). Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup adaptasi dan penyesuaian diri dengan masyarakat sekitar, termasuk peningkatan taraf hidup yang layak. Hal ini mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam mencapai standar kehidupan yang layak dan bermartabat.

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah memikul kewajiban untuk mengimplementasikan program-program yang komprehensif, terencana, dan berkesinambungan. Agenda pemerintah ini meliputi beragam aspek pelayanan sosial yang saling terkait. Di antaranya adalah upaya rehabilitasi untuk memulihkan

fungsi sosial individu, sistem jaminan sosial untuk memberikan perlindungan ekonomi, inisiatif pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, serta langkah-langkah perlindungan sosial untuk menjaga hak-hak warga negara yang rentan. Seluruh program ini dilaksanakan dengan berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati standar hidup yang layak dan memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan memberikan dukungan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2012). Penanganan masalah kesejahteraan sosial fakir miskin menjadi kewajiban pemerintah sesuai dengan konstitusi, Pada Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (2) menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan tidak tergantung pada kondisi sosial ekonomi mereka. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Perlunya pelayanan sosial yang memadai mencakup upaya untuk menyediakan dukungan komprehensif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mendukung kesejahteraan mental dan sosial individu. Hal Ini dapat disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial. Peraturan tersebut menetapkan pedoman untuk mengelola data terpadu yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, memastikan keakuratan informasi, dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan, yang menegaskan pentingnya integrasi dan koordinasi dalam menangani kebutuhan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020, Panti Sosial sebuah lembaga atau unit layanan yang memberikan rehabilitasi sosial kepada kelompok sasaran tertentu dengan tujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi sosialnya. Keberhasilan pelayanan di panti dianggap tercapai jika tujuan rehabilitasi sosialnya terpenuhi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, yang berada di bawah naungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah melakukan studi mendalam mengenai berbagai aspek yang berperan dalam menentukan keberhasilan layanan sosial di institusi panti sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kunci yang mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh panti-panti sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek kelembagaan di panti sosial seperti sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana, dan struktur organisasi memiliki peran krusial dalam operasional panti sosial. Komitmen dari seluruh organisasi juga sangat penting, yang tercermin dalam dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas mereka di panti sosial. Selain itu, kebijakan panti yang mencakup implementasi tugas pokok panti sosial dan tahapan rehabilitasi sosial

juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan yang diberikan (Astuti et al., 2015).

Steers menyatakan bahwa efektivitas adalah upaya suatu program untuk mencapai tujuan dan sasaran tanpa menghabiskan sumber daya yang ada secara berlebihan atau memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Sementara menurut Schemerhorn (1986), efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian hasil yang diinginkan yang diukur dengan membandingkan *output* yang direncanakan dengan *output* yang sebenarnya, dan dianggap efektif jika *output* yang diperoleh lebih besar dari yang direncanakan.

Panti sosial menyediakan layanan berupa pembinaan karena tujuan utamanya adalah untuk membantu dan memperbaiki kondisi atau kualitas kehidupan bagi individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan sosial. Pembinaan adalah proses transformatif di mana seseorang melepaskan pengetahuan lama dan menyerap informasi baru. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan yang ada, memperoleh kompetensi baru, dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional. Proses ini melibatkan pembelajaran aktif untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek kehidupan. (Mangunhardjana, 1989). Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, pembinaan adalah upaya untuk melakukan tindakan dan kegiatan secara efektif guna mencapai hasil yang optimal.

Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Jakarta Timur, yang merupakan bagian dari struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, memiliki mandat utama untuk memberikan tempat penampungan sementara dan pelayanan

pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang biasa disebut sebagai Warga Binaan Sosial (WBS). WBS ini umumnya ditangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Undang-undang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, khususnya Pasal 39 dan 40. Di PSBI BD 2, PPKS yang menjadi fokus penanganan meliputi beragam kategori individu yang rentan. Di antaranya termasuk mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, orang-orang yang mencari nafkah dengan memintaminta, individu yang terlibat dalam industri seks komersial, anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan perawatan, anak-anak yang hidup di jalanan, orang lanjut usia yang terabaikan, penderita gangguan jiwa yang tidak terurus, serta penyandang disabilitas yang tidak mendapat dukungan memadai. Kategori ini juga mencakup berbagai kelompok rentan lainnya yang memerlukan bantuan dan perlindungan sosial. PSBI BD 2 berada di bawah pengawasan Dinas Sosial DKI Jakarta dan fokusnya terletak di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. PSBI BD 2 bekerja sama dengan suku dinas, Dinas Sosial, Satpol PP, dan Kepolisian dalam melakukan penertiban dan penjaringan PPKS.

Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 bertanggung jawab dalam memberikan solusi alternatif untuk menangani tantangan yang dihadapi oleh Warga Binaan Sosial (WBS) dan juga berperan dalam memberikan pembinaan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi bakat yang dimiliki oleh WBS. Tujuan dari layanan yang diberikan mencakup pembinaan musik, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan, pembinaan sadar hukum, pembinaan dinamika kelompok dan pembinaan agama. Faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembinaan

adalah kehadiran Warga Binaan Sosial dalam mengikuti program pembinaan, waktu dilaksanakannya program pembinaan, fasilitas yang diberikan dan pembina program pembinaan, cara pemateri dalam menyampaikan materi. Pelayanan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 di Jakarta Timur ditopang oleh beberapa pegawai untuk menjalankan fungsi layanan mereka. Namun, tidak semua dari mereka memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa ada berbagai peran dan latar belakang yang berkontribusi terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, meskipun tidak semua pegawai memiliki pendidikan khusus di bidang ini. Dalam konteks ini Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, meskipun tidak semua pegawai memiliki latar belakang formal di kesejahteraan sosial, mereka tetap dapat berperan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai dengan kemampuan dan peran yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam menjalankan tugas, penting bagi para petugas untuk menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang adil terhadap semua Warga Binaan. Panti Sosial juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugasnya, karena Warga Binaan merupakan bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan sosial yang layak. Penanganan masalah Warga Binaan Sosial (WBS) ini sangatlah penting untuk diperhatikan setiap Warga Binaan Sosial (WBS) tidak dapat diselesaikan sehingga

membuat Warga Binaan Sosial (WBS) turun kembali ke jalanan.

Program pembinaan dapat berjalan efektif didukung juga oleh pengetahuan dan kemampuan para Pembina Warga Binaan Sosial dalam pelaksanaan program pembinaan. Warga Binaan Sosial (WBS) di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Kota Jakarta Timur hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang mencukupi, dengan berbagai masalah dalam keluarga dan kehidupan pribadi mereka. Masalah-masalah yang dihadapi meliputi masalah keuangan, komunikasi, perbedaan kepribadian, kekerasan, serta masalah lain yang memerlukan solusi. Warga Binaan Sosial pun memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Sikap dapat mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi perilaku juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti norma sosial, situasi, dan kondisi psikologis atau emosional saat itu. Emosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manusia. Emosi berperan penting dalam adaptasi individu terhadap perubahan dan stress pada Warga Binaan selama berada di dalam wisma. Hal ini menjadikan tidak semua Warga Binaan bisa mengikuti program pembinaan dikarenakan Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Kota Jakarta Timur ini mengurangi resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga keterbatasan petugas pada saat program pembinaan. Pada saat program pembinaan berlangsung Warga Binaan Sosial akan dikeluarkan dari wisma banyak kejadian yang terjadi Warga Binaan tersebut menggunakan kesempatan untuk kabur karena keterbatasan jumlah petugas di lapangan. Terdapat beberapa Warga Binaan yang sudah dipulangkan tetapi Kembali lagi. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan belum merata kepada seluruh Warga Binaan Sosial dan kinerja para pelaksana program yang

belum maksimal dalam melaksanakan pembinaan.

Permasalahan lainnya yang peneliti temui langsung di lapangan pada saat kunjungan Over Capacity yang terjadi di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 jelas menjadi kendala, Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 memiliki daya tampung 500 Warga Binaan Sosial (WBS) sedangkan jumlah pegawai yang hanya berjumlah 44 pegawai jelas tidak seimbang dengan jumlah Warga Binaan Sosial yang berjumlah 658 orang. Hal ini mengakibatkan fokus pegawai tidak hanya berpusat kepada satu warga binaan. Sehingga memungkinkan tidak terpenuhinya kebutuhan masing-masing Warga Binaan. Hal tersebut menjadi permasalahan pada program pembinaan dimana tidak semua Warga Binaan Sosial yang berjumlah 658 orang bisa mengikuti pembinaan lanjutan. Pembinaan lanjutan yang dilaksanakan hanya diikuti oleh 35 Warga Binaan Sosial dikarenakan perbedaan sikap dan perilaku Warga Binaan Sosial yang tidak memungkinkan untuk diikutsertakan mengikuti pembinaan lanjutan.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salsabilla dengan judul “Efektivitas Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Suka Miskin Kota Bandung” dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan sudah cukup baik namun kurang maksimal dalam pembina membimbing Warga Binaan pada saat program pembinaan dan kurangnya jumlah pembina.

Permasalahan yang terjadi diatas menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Program Pembinaan Terhadap Warga Binaan Sosial di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pemmasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut “Efektivitas Program Pembinaan terhadap Warga Binaan Sosial (WBS) Di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2”. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut diuraikan dalam sub-sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman Program Pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Kota Jakarta Timur?
2. Bagaimana Ketepatan Sasaran Program Pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2?
3. Bagaimana Ketepatan Waktu Program Pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 ?
4. Bagaimana Ketercapaian Tujuan Program Pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2?
5. Bagaimana Perubahan Nyata Program Pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan terperinci berdasarkan bukti-bukti empiris mengenai fenomena yang diteliti, dengan tujuan akhir untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan informatif sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman responden terhadap pelaksanaan program pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Kota Jakarta Timur.

2. Tingkat akurasi pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam program pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Kota Jakarta Timur.
3. Evaluasi terhadap keteraturan waktu dalam pelaksanaan program pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Kota Jakarta Timur.
4. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam program pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Kota Jakarta Timur.
5. Analisis terhadap perubahan yang nyata terjadi dalam implementasi program pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Kota Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan dari studi ini mampu menyajikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang efektivitas Program Pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk ide-ide inovatif dan solusi praktis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Pekerja Sosial, dan pihak terkait dalam pelaksanaan program pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan panduan yang bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan kesejahteraan sosial di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, ini memaparkan latar belakang masalah, merumuskan pertanyaan penelitian kunci, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, menguraikan manfaat yang diharapkan, dan menjelaskan struktur penelitian secara ringkas.
- BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL**, ini mengkaji studi-studi sebelumnya yang relevan, menyajikan konsep-konsep teoretis yang mendukung penelitian, dan menggambarkan kerangka pemikiran yang mendasari pendekatan penelitian ini.
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**, mencakup rancangan studi, definisi operasional, deskripsi setting penelitian, penentuan sumber data, metode pengumpulan informasi, validasi data, teknik analisis, serta rencana dan tahapan pelaksanaan. Setiap aspek dirancang untuk memastikan kualitas dan keandalan hasil penelitian.
- BAB IV** : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan
- BAB V** : **USULAN PROGRAM**, ini menyajikan rekomendasi atau solusi yang diusulkan peneliti berdasarkan temuan studi. Peneliti menawarkan program atau pendekatan spesifik yang dirancang untuk mengatasi permasalahan berdasarkan hasil penelitian.
- BAB VI** : **SIMPULAN DAN SARAN**, ini merangkum temuan utama penelitian dan menyajikan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil yang diperoleh.